



Kalbar

Tidak

Lama

Lagi!



PONTIANAK, SP - Ada harapan baru di kalangan masyarakat ketika Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu (15/6/2022) lalu. Diaberrjanji akan memberantas mafia tanah yang merugikan rakyat.

Diketahui, sejak dilantik sebagai Menteri ATR, Hadi Tjahjanto langsung bergerak cepat membasmi mafia tanah. Sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat praktik mafia tanah pun ditangkap polisi.

Menteri Hadi Tjahjanto juga mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia dan mengingatkan soal upaya pemberantasan mafia tanah.

Menurut Hadi Tjahjanto tugasnya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat (tanah) milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin dicapainya 126 juta sertifikat.

Tak hanya itu, kata Hadi, dirinya juga ditugaskan presiden untuk menyelesaikan urusan sengketa tanah.

"Paling ketar-ketir adalah mafia tanah. Selesai sudah. Oleh karena itu, tugas saya saat ini adalah di antaranya bagaimana memberantas mafia tanah," kata Hadi Tjahjanto melalui keterangan tertulis dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, belum lama ini.

• Baca Halaman 7



Menurut keterangan polisi, 27 orang ditetapkan sebagai tersangka, empat diantaranya pejabat BPN. Tersangka itu terlibat kasus mafia tanah di empat wilayah di Jakarta dan Bekasi. Penangkapan ke-27 orang baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Belum di luar Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, belum lama ini mengatakan polisi telah mencokok empat pejabat BPN terkait sindikat mafia tanah. Total ada empat pejabat ASN di BPN kantor wilayah Jakarta dan Bekasi.

"Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu mengatakan, keterlibatan pejabat di BPN disinyalir melibatkan sejumlah pejabat lain. Mafia tanah ini pun melibatkan sejumlah pegawai BPN, termasuk juga pendananya.

Penangkapan pejabat BPN ini tidak lepas dari dukungan Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI.

"Untuk pegawai BPN ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN," katanya.

Keempat pejabat BPN ini ditangkap pada beberapa wilayah. Salah seorang yang ditangkap adalah PS. Ia merupakan Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara.

Polisi menyebut PS merupakan aktor intelektual dalam kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. PS diduga telah mengganti data pada sertifikat tanah.

Menurut Kasubdit Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi, dari hasil penyelidikan PS diketahui menyiapkan alat khusus untuk mengubah data-data tersebut.

"Polisi menemukan alat yang digunakan para tersangka untuk menghapus data tulisan yang sudah tercetak atas korban di sertifikat. Setelah dihapus kemudian ditimpa ketika dengan atas nama tersangka lainnya di lembar sertifikat tersebut," katanya.

Sementara Kanit I Subdit Harda Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKP Mulya Adhimara mengungkapkan alat yang digunakan PS terbilang sederhana, yakni cairan pemutih hingga cotton bud atau alat pembersih telinga.

"Jadi untuk menghapus tulisan yang sudah diketik di sertifikat hanya dengan butuh bayclin, kayu kecil dengan dililit tisu atau bisa juga dengan cotton bud," tutur Mulya.

PS ditangkap di Depok pada Selasa (12/7) sekitar pukul 23.30 WIB. Ia diduga menerbitkan sejumlah sertifikat bermasalah yang peralihannya dilakukan tanpa prosedur yang benar.

Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun saat kasus terjadi, PS menjabat sebagai Ketua Ajudifikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan.

"Jadi PS adalah aktor intelektual yang bekerja sama dengan sejumlah pendana. Dia ini menerbitkan sertifikat dengan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes

Hal 1 | **kalbar tidak**

Untuk memberantas mafia tanah, Hadi mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolri hingga ke Kapolda.



Pol Endra Zulpan.

Ia menyebut PS diduga kerap menerbitkan sejumlah sertifikat bermasalah. Modusnya dengan memproses peralihan kepemilikan sertifikat tanah yang dilakukan tanpa prosedur yang benar.

"Disinyalir ada banyak objek tanah lain yang sertifikatnya bermasalah yang diterbitkan oleh oknum pejabat BPN ini. Untuk saat ini sudah ada 6 laporan yang kami tangani," terang Zulpan.

Dalam kasus ini polisi juga sudah menggeledah kantor wilayah BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7).

Dalam penggeledahan itu polisi menemukan sejumlah sertifikat yang semestinya sudah diserahkan kepada masyarakat sejak tiga tahun lalu.

"Kita temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari tiga tahun lalu, tapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat," kata Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.

Hengki menambahkan, kasus mafia tanah ini melibatkan pemodal, pejabat BPN, serta instansi lainnya.

Para sindikat itu berkomplot mengambil hak masyarakat bahkan pemerintah dengan mengubah identitas bahkan penahanan atas kepemilikan sertifikat tanah.

"Jadi kelompok ini berkomplot melakukan perubahan identitas kepemilikan sertifikat. Ini melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum BPN sendiri," jelasnya.

Kemarin polisi juga kembali menangkap tiga orang yang merupakan jaringan sindikat mafia tanah ini. Dari tiga orang itu, dua orang merupakan pejabat BPN dan satu orang mantan pejabat BPN.

"Benar, ada tiga orang yang ditangkap. Dua orang masih aktif menjabat, sedangkan yang satu lagi sudah pensiun," ujar Zulpan.

Ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya.

Ketiganya ditangkap terkait kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi. "Ketiga tersangka sudah ditahan. Ini maish dari pengembangan kasus kemarin," jelas Zulpan.

Hengki Haryadi membenarkan penangkapan ketiga tersangka itu. Hengki bahkan membeberkan, salah satu tersangka yang ditangkap adalah Kepala Kantor BPN Kota Palembang berinisial NS (50).

NS dipersangkakan atas praktik mafia tanah sewaktu bertugas di BPN Kabupaten Bekasi.

NS ditangkap atas tindak pidana terkait mafia tanah yang terjadi di Bekasi ketika menjabat sebagai Kasie Infrastruktur Pengukuran pada Kantor BPN Kabupaten Bekasi," kata Hengki dalam keterangannya.

Adapun tersangka lainnya berinisial RS (58) yang menjabat Kasie Survei pada kantor BPN Bandung Barat. RS sebelumnya menjabat sebagai Kasie Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Bekasi Kabupaten. Terakhir PS (59) seorang pensiunan BPN, ia diketahui mantan koordinator pengukuran kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Hengki menuturkan, ketiga tersangka ini terlibat kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016-2017.

Mereka diduga bekerja sama dalam menerbitkan warkah palsu. "Ketiga tersangka ini menerbitkan peta bidang berdasarkan warkah palsu," kata Hengki.

Adapun, pembuatan peta bidang ini tidak dilakukan melalui prosedur yang benar dengan melakukan survei dan pengukuran. "Tetapi, peta bidang tersebut menimpa sertifikat milik korban," katanya.

Dengan penangkapan 3 orang kemarin, total sudah 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah ini. Sebagian besar mereka adalah pegawai ASN lintas instansi di lingkungan BPN.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teguh Hari Prihatono mengatakan kementerian yang kini dipimpin mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Hadi Tjahjanto itu telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi.

Tim investigasi akan melakukan penelusuran secara menyeluruh di internal ATR/BPN untuk memberantas praktik kejahatan agraria itu.

"Kalau dari ATR/BPN sendiri Pak Menteri kemarin sudah memerintahkan Irjen untuk mengusut. Makanya sudah dibuat tim untuk investigasi. Jadi atas penangkapan kemarin di internal kami langsung berbenah," kata Teguh.

Teguh menyatakan, Menteri Hadi prihatin bahwa enam pejabat BPN ditangkap atas praktik mafia tanah. Teguh menyebut Kementerian ATR/BPN mempersilakan kepolisian dan kejaksaan memproses hukum jika para pejabat terbukti terlibat praktik mafia tanah.

"Pak Hadi sendiri tentu prihatin atas kejadian kemarin, beliau menyayangkan anak buahnya tersangkut kejahatan agraria. Namun, sikap Pak Hadi tegas kalau memang itu terbukti ya diproses secara hukum. Jadi silakan untuk pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memproses lebih lanjut," kata Teguh.

Teguh menuturkan, Kementerian ATR/BPN akan menggelar rapat koordinasi terkait dugaan praktik mafia tanah di lingkungan pejabat BPN.

Menteri Hadi akan mengumpulkan Kakanwil dan Kakantah di Indonesia untuk arahan langsung olehnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN akan menggelar sidang kode etik untuk menentukan nasib keenam pejabat BPN yang ditangkap Polda Metro Jaya.

"Di internal nanti akan ada sidang kode etik. Jadi di sana akan ada sanksi administrasi dan kebijakannya kan PP 94 tahun 2001 tentang ASN terutama di Pasal 7 dan 8 itu diatur tentang sanksi-sanksi administrasi baik itu dari penonaktifkan atau pemecatan," katanya.

Kasus di Kalbar

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, Menteri Hadi Tjahjanto memiliki tekad kuat dengan membersihkan lingkungan internal yang terbukti terlibat mafia tanah.



Menurut Petrus ada harapan baru di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah mafia tanah dengan dilantiknya Hadi Tjahjanto. Sejak dilantik sebagai Menteri ATR, Hadi Tjahjanto langsung bergerak cepat membasmi mafia tanah. Sejumlah pejabat BPN yang diduga terlibat praktik mafia tanah pun ditangkap.

Petrus menilai, maraknya penangkapan terhadap

mafia tanah dari kalangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena Hadi Tjahjanto selaku menteri memberikan dorongan penuh kepada Satuan Tugas Anti Mafia Tanah yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu di Kalbar, Petrus Selestinus mengatakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akan menangani unsur korupsi dari kasus mafia tanah atas korban Lili Santi Hasan (58).

Petrus menjelaskan, keputusan ditanganinya kasus ini oleh Kejati Kalbar setelah penyelidikan Direktorat Reserse Polda Kalbar atas atensi Bareskrim Polri, belum membuahkan hasil sesuai harapan.

Menurut Petrus, Lili Santi Hasan dan korban lainnya, Edy Prayitno (60 tahun), pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Kantor Pertahanan di Provinsi Kalbar, telah membuat pengaduan tertulis yang sudah disampaikan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar di Pontianak, Senin (11/7/2022).

Ini hasil diskusi dengan berbagai pihak. Terutama dengan salah satu anggota DPR-RI di Jakarta, dimana berjanji terus memonitor kasus ini sampai tuntas di Kejati Kalbar, setelah adanya atensi dari Jaksa Agung RI.

"Kami sangat yakin kasus ini bisa dibongkar Jaksa. Kami percaya akan kredibilitas Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar," kata Petrus, Minggu (17/7).

Petrus secara khusus mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rudi S Kamri dan crew dari Kanal Anak Bangsa, dimana melalui jaringan yang mereka miliki, sangat proaktif mempertemukan Lili Santi Hasan dengan banyak pihak dalam memperjuangkan haknya sebagai korban mafia tanah.

Petrus juga mengucapkan terimakasih kepada salah satu sahabatnya yang ikut berjuang membela kepentingan korban mafia tanah, Lili Santi Hasan.

Petrus belum bersedia menyebutkan nama sahabatnya tersebut yang ikut berjuang membela kepentingan Lili Santi Hasan, karena terkait dengan etika profesi.

"Kasus korban mafia tanah atas nama Lili Santi Hasan ini sudah terang benđerang," ujar Petrus.

Oknum pengusaha dari PT Bumi Indah Raya pemilik hak pakai yang terbit tahun 2007, lokasinya menacaplok jalan negara yang sudah dibebaskan tahun 2005, bisa memenangkan gugat di Mahkamah Agung pada 1 Maret 2022.

"Unsur korupsinya tanan negara dalam bentuk jalan raya dicaplok masuk areal sertifikat hak pakai. Semua orang tahu itu unsur korupsinya," kata Petrus.

Lokasi yang disengketa di depan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Jalan Mayor Alianjang, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

Petrus mengatakan, sekarang melakukan peninjauan Kembali. Tapi kasus kriminal dan korupsi di Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, mesti tetap jalan. (aju/bb/vv/*)